



**TAJUK RENCANA...**

**Jogja, Integritas, dan Korupsi**

WALIKOTA Yogyakarta H. Herry Zudianto dalam bukunya bertajuk *Keluasaan Sebagai Wakaf Politik - Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur* (2008) mengemukakan, "Sejak terpilih sebagai Walikota Yogyakarta (tahun 2001, red), ada tiga prinsip utama yang saya pegang sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam kebijakan publik saya, yakni hakekat kekuasaan, etika komunikasi politik, dan dimensi keadilan. Ketiga hal itu dapat saya sebut sebagai prinsip etika kepemimpinan."

Tentang etika kepemimpinan, Herry Zudianto menjelaskan dalam beberapa prinsip. *Pertama* adalah masalah definisi dan hakikat kekuatan. Begitu dia terpilih dan dilantik menjadi Walikota Yogyakarta maka sejak saat itu dia harus memastikan bahwa dia harus benar-benar merasa memiliki, dimiliki dan dihormati oleh semua pihak. Dia ingin agar masyarakat dari semua komponen politik dan semua strata sosial merasa memiliki dia. Mereka harus bisa merasa bahwa dia adalah bagian dari mereka.

Prinsip *kedua* menyangkut etika komunikasi politik. Sebagai pemimpin dia berusaha untuk tidak bersikap sombong. Kemampuan mendengar dia harus maksimal. Dia harus belajar mendengar berbagai pendapat dari banyak pihak. Artinya, setiap keputusan yang diambil selalu didahului oleh upaya menyerap aspirasi dari banyak pihak.

Prinsip *ketiga* menyangkut dimensi keadilan. Dia menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada satu keputusan pun yang sempurna dan bahwa keputusan yang dia ambil tidak mungkin dapat dan harus memuaskan semua pihak. Apalagi kalau berbicara tentang "adil". Adalah sangat sulit untuk merumuskan makna dan kriteria sebuah keputusan yang adil. Oleh karenanya, dia selalu terlebih dulu mendengar berbagai aspirasi, pendapat dan kepentingan dari berbagai pihak untuk mengeliminasi kemungkinan terjadi keputusan yang tidak adil.

Dengan prinsip-prinsip dalam pedoman pengambilan keputusan Walikota Herry Zudianto dalam kebijakan publik seperti di atas, Pemkot Yogyakarta menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat dan aneka lembaga lain khususnya di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2010 misalnya, diberikan oleh Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award kepada Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Herry Zudianto yang terus berupaya menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta menjadi inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kardi, SH kepada *Bernas Jogja* di kantornya kemarin mengemukakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil surveinya tentang integritas sektor publik Indonesia di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (6/12/2011) lalu. Hasil survei tersebut dipaparkan oleh Direktur Penelitian dan Pembangunan KPK Donny Muhandiansyah, didampingi Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin.

Donny menyebutkan 10 pemerintah daerah (pemda) dan instansi negara dengan indeks integritas tertinggi dan terendah. Untuk indeks integritas tertinggi sebagai berikut : 1. Pemkot Dumai (nilai 7,77), 2. Pemkot Bukit Tinggi (7,67), 3. Pemkot Bitung (7,62), 4. Pemkot Yogyakarta (7,60), 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (7,60), 6. Kementerian Keuangan (7,56), 7. Pemkot Batam (7,55), 8. Pemkot Pontianak (7,54), 9. Kementerian Kesehatan (7,52), 10. PT Jamsostek (7,52).

Kemudian 10 pemda dan instansi negara dengan indeks integritas terendah adalah : 1. Pemkot Lubuk Linggau (4,38), 2. Pemkot Bogor (4,37), 3. Pemkot Palembang (4,25), 4. Pemkot Bengkulu (4,18), 5. Pemkot Ternate (4,07), 6. Pemkot Manokwari (3,70), 7. Pemkot Semarang (3,61), 8. Pemkot Serang (3,54), 9. Pemkot Depok (3,50) dan 10. Pemkot Metro (3,15). Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman integritas instansi dan pemda dalam hal korupsi. Seperti cara pandang terhadap korupsi, jumlah atau berapa besar gratifikasi, frekuensi pemberian gratifikasi, arti pemberian gratifikasi dan tujuan gratifikasi.

Menurut hemat kita, sebagaimana juga pendapat Kajari Yogyakarta Kardi, SH, prestasi Pemkot Yogyakarta untuk integritas dalam hal korupsi itu perlu diapresiasi, ditingkatkan dan didukung semua pihak agar korupsi benar-benar hilang di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Sebagaimana juga dilaporkan lembar *Bernas Remaja* edisi Rabu (14/12) kemarin, *Korupsi, Nggak Banget!!!*. Berani jujur, hebat! \*\*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005